

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PANCURAN BANGKO

SILVIA
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:
silvia@gmail.com

Skripsi ini dilatar belakangi oleh permasalahan Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Pancuran Bangko. Melalui penelitian ini ingin di jawab dua hal penting yaitu bagaimana upaya yang di lakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Pancuran Bangko dan apa saja kendala yang di hadapi pemerintah Desa dalam melakukan Penanggulangan kemiskinan di Desa Pancuran Bangko. Untuk menjawab persoalan di atas, maka peneliti menggunakan metodologi penelitian yang sistematis. Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan adalah kualitatif, setting penelitiannya di Desa Pancuran Bangko, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi Pemerintah Desa Pancuran Bangko, khususnya peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Pancuran Bangko. Setelah melakukan penelitian tentang Peran Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Pancuran Bangko dapat di ambil kesimpulan salah satunya yaitu Peran Kepala Desa sebagai aparat pemerintah dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan di Desa Pancuran Bangko yang mana dapat kita lihat dari pelimpahan wewenang Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Pancuran Bangko yang mana Pemerintah Desa bisa disebut juga sebagai dapur bagi pemerintahan. Yang mengatur dan merencanakan setiap pembangunan guna melakukan Penanggulangan kemiskinan yang ada di Desa Pancuran Bangko.

Kata Kunci : Pemerintah Desa dan Penanggulangan Kemiskinan.

I. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Proses pencapaian tujuan bagi setiap negara pada dasarnya sama walaupun berbeda dalam rumusnya. Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (alinea ke IV) yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan Nasional diharapkan dapat menyentuh semua lapisan masyarakat baik yang ada dipertanian maupun pedesaan. Namun dalam proses pelaksanaan pembangunan, kemiskinan merupakan hal yang menjadi permasalahan krusial yang menghambat percepatan tujuan-tujuan pembangunan nasional di Indonesia, baik ditingkat nasional hingga daerah yang terlebih di wilayah pedesaan. Banyak persoalan yang menyangkut pedesaan dimana permasalahan itu saling berkaitan satu sama lain, sehingga ada kecenderungan masalah pedesaan sulit keluar dari permasalahan kemiskinan. Padahal lebih dari 80 % penduduk Indonesia adalah penghuni Desa. BAPPENAS (2019).

Tabel 1.2
Angka Kemiskinan Desa Pancuran Bangko Tahun 2020

No	Nama Dusun	Jumlah
1.	Dusun Pinggir Jalan	2KK
2.	Dusun Pinggir Bukit	5 KK
3.	Dusun Pancuran Sumanik	4 KK

Sumber Data Pemerintahan Desa Pancuran Bangko 2020

Berdasarkan Tabel angka kemiskinan diatas masih terdapat masyarakat miskin di Desa Pancuran Bangko, Dalam hal ini perlunya Peran Pemerintah Desa Pancuran Bangko untuk lebih cepat menanggulangi kemiskinan seperti seperti yang telah dikeluarkannya PERBUP Kerinci No 2 Tahun 2018 tentang alokasi dana Desa 50 Untuk warga miskin harus segera tersalurkan.

Pemerintahan Desa Pancuran Bangko terkesan lambat dalam menangani kemiskinan baik pemerintahan sekarang maupun pemerintahan sebelumnya, selain itu juga kurangnya pengetahuan perangkat Desa di segi Pemerintahan Desa. Bahkan tidak adanya trobosan Pemerintahan Desa seperti mengadakan Kursus ataupun kegiatan-kegiatan yang mampu mengurangi angka kemiskinan. Dalam hal ini Pemerintah Desa Pancuran Bangko dituntut harus lebih professional dalam bekerja demi kesejahteraan masyarakat di Desa Pancuran Bangko dan mampu mengurangi angka kemiskinan.

Terkait dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Desa Pancuran Bangko di Temukan Fenomena yaitu :

- Lambatnya Pemerintahan Desa Pancuran Bangko dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- Kurangnya Pendapatan masyarakat selama pandemi

- c. Banyaknya keluhan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. Belum ada trobosan dari Pemerintah Desa Pancuran Bangko seperti Kursus ataupun kegiatan-kegiatan yang mampu mengurangi angka kemiskinan di Desa Pancuran Bangko

Rumusan Masalah

Bagaimanakah Peran Pemerintah Desa dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Pancuran Bangko?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Soerjono Soekanto (2007:221) mengemukakan bahwa teori peran (role theory) adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula, tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut. Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau prilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dan lingkungannya. Peran merupakan dinamisasi dan statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian. Tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang “miskin” Criswardani Suryawati, 2005 : 18).

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup :

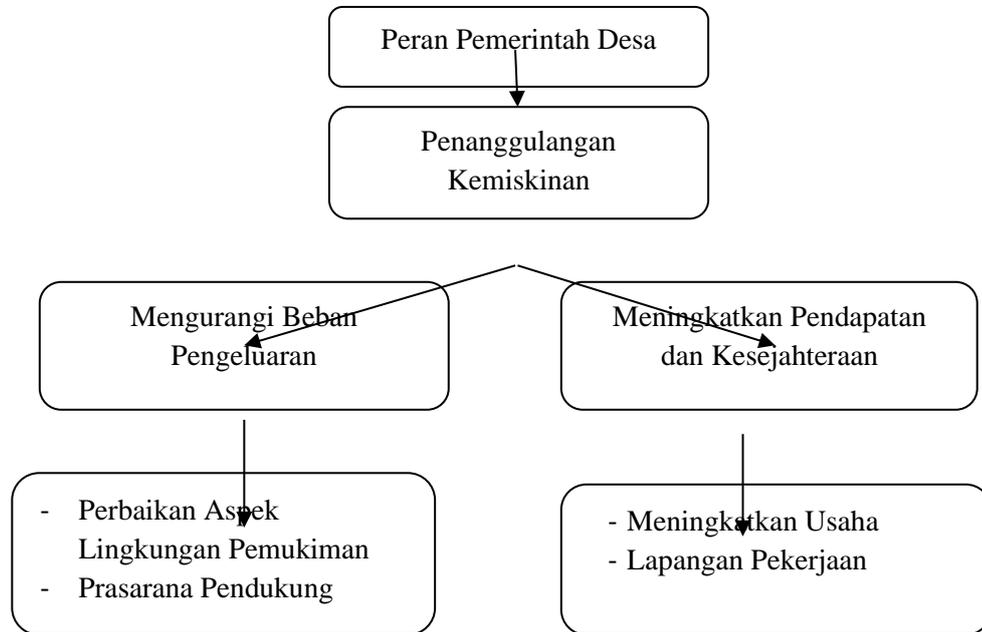
1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilkan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilkan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai, makna "memadai" disini sangat berbeda-beda melintas bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Wrihatnolo Randy (2011:22) Upaya dasar Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk miskin dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut

- a. Mengurangi beban pengeluaran
Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin adalah segenap upaya Pemerintah, swasta dan masyarakat yang secara langsung melakukan campur tangan kedalam beberapa bentuk kegiatan penduduk miskin dengan tujuan pengembangan dan pemberdayaan kemampuan manusia berkaitan dengan perbaikan aspek lingkungan, pemukiman, perumahan dan prasarana pendukungnya.
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
Meningkatkan pendapatan penduduk miskin adalah segenap upaya Pemerintah, swasta dan masyarakat yang secara langsung terlibat berbagai bentuk kegiatan penduduk miskin dengan tujuan utama pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan aspek usaha, lapangan kerja dan lain-lain yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber Wrihatnolo Randy (2011:22)

Peran pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Menurut Wrihatnolo Randy (2011;22) upaya dasar Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk miskin dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut

a. Mengurangi beban pengeluaran

Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin adalah segenap upaya Pemerintah, swasta dan masyarakat yang secara langsung melakukan campur tangan kedalam beberapa bentuk kegiatan penduduk miskin dengan tujuan pengembangan dan pemberdayaan kemampuan manusia berkaitan dengan perbaikan aspek lingkungan, pemukiman, perumahan dan prasarana pendukungnya.

b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

Meningkatkan pendapatan penduduk miskin adalah segenap upaya Pemerintah, swasta dan masyarakat yang secara langsung terlibat berbagai bentuk kegiatan penduduk miskin dengan tujuan utama pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan aspek usaha, lapangan kerja dan lain-lain yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan dan menganalisis data secara mendalam mengenai penanggulangan kemiskinan di Desa Pancuran Bangko Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Berdasarkan konteks permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan dengan judul "Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Pancuran Bangko Kecamatan Keliling Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi, maka peneliti akan membahas dan menganalisis dari setiap pemaparan hasil penelitian berdasarkan aspek temuan yang ada. Namun sebelumnya peneliti menyusun temuan dari hasil penelitian agar terorganisir, lebih seksama dan mudah dipahami. .

Upaya dasar Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk miskin dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.

- a. Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin yaitu upaya Pemerintah Desa dalam Mensejahterakan Masyarakat miskin mencakup aspek permukiman warga dan meningkatkan prasarana pendukung lainnya
- b. Mengurangi Beban Pengeluaran Penduduk Miskin yaitu Suatu Upaya Pemerintah Desa dengan cara mengembangkan usaha, membentuk pelatihan guna untuk meningkatkan sumberdaya manusia dan mampu membuka lapangan pekerjaan serta mensejahterkan masyarakatr miskin di Desa Pancuran Bangko.
1. Upaya dan Peran Pemerintah Desa dalam Penanganan Kemiskinan di Desa Pancuran Bangko. Sebagai lembaga tertinggi Pemerintah dituntut semaksimal mungkin dalam menentukan kebijakan yang pro-rakyat dan tepat dalam upaya memangkas angka kemiskinan. Seperti yang telah diketahui berdasarkan wawancara dengan Satuan Kerja Perangkat Desa bahwasanya program penanganan kemiskinan di Desa Pancuran Bangko ialah, Raskin (Beras untuk Masyarakat Miskin) atau Rastra (Beras Sejahtera), dan PKH (Program Keluarga Harapan) yang dulu dikenal dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Seperti yang diungkapkan Bapak Hendri Kepala Desa Pancuran Bangko (kamis 26 agustus 2021 jam 10:30 wib). "Program penanggulangan kemiskinan di Desa Pancuran Bangko yang melalui kelurahan yaitu, Raskin,

BLT, kemudian rencananya akan ada bantuan bedah rumah. Rencana tahun ini tapi terkendala covid 19 maka di urungkan buat sementara. Sudah didata juga oleh tim pendataan langsung. Jadi Desa tidak bisa intervensi. Kalo bantuan lain-lain seperti sembako itu sering aja ke Desa Pancuran Bangko, dibagi semua warga.”.

Program yang dilakukan Pemerintah Desa berjalan dengan baik, terbukti dengan dibangunnya beberapa fasilitas publik bagi masyarakat. Selain program yang bersifat memberdayakan juga ada program pemberian bantuan sosial yaitu Raskin/Rastra dan BLT/PKH. Tujuan dari pemberian bantuan raskin adalah:

- a. Mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
 - b. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - c. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
 - d. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.
2. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam menanggulangi Kemiskinan. Ada beberapa kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Pancuran Bangko, yaitu :
- a. Kebijakan Umum
terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat miskin dengan empat tujuan yang saling berkaitan yaitu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja.
 - b. Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar
Pemenuhan Hak atas Pangan bagi masyarakat miskin laki-laki dan perempuan dilakukan dengan :
 - Memperluas kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada penyempurnaan system penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau.
 - Memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan dengan berbasis masyarakat.
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin yang dilakukan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan.
 - Meningkatkan perlindungan sosial melalui kehidupan yang diarahkan pada perlindungan dan jaminan kecukupan pangan pada kelompok yang rentan terhadap guncangan ekonomi, sosial dan bencana alam.
3. Kendala Pemerintah Desa Pancuran Bangko dalam Penanggulangan Kemiskinan, adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengentas Desa Pancuran Bangko yaitu :
- a. Sumber Daya Manusia Aparat Pemerintahan Desa Pancuran Bangko.
Keberadaan aparat pemerintah Desa tidak bisa dilepaskan dari tugas pokok yang diemban oleh pemerintah, yaitu melayani masyarakat. Tugas pelayanan ini

menekankan mendahulukan kepentingan umum dan memberikan kepuasan terhadap publik. Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Rosiana warga Desa Pancuran Bangko (Senin 30 Agustus 2021 jam 14:00 wib) “Salah satu kendala yang menjadi penghambat dalam upaya mengentas kemiskinan di Desa Pancuran Bangko yaitu SDM yang sangat terbatas, yang mana hendaknya mereka yang diterima disini sesuai dengan yang kita butuhkan atau sesuai dengan keadaannya”.

- b. Dalam segi Sarana dan Prasarana yaitu Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sangat menghambat kinerja pemerintah demi terselenggaranya pemerintahan. Sarana perhubungan yang kurang memadai ini masih menjadi PR tersendiri bagi aparat pemerintah Desa Pancuran Bangko. Seperti jalanan yang rusak, susahya akses menuju lokasi yang ingin dituju, dan masih ada pemukiman atau rumah warga yang belum menikmati air bersih dan belum tersedianya WC didalam rumahnya sendiri. Seperti yang diungkapkan Ibu Rosiana warga Desa Pancuran Bangko (Senin 30 agustus 2021 jam 14:00 wib) beliau mengungkapkan “Susahnya akses menuju lokasi yang ingin dicapai menjadi penghambat yang cukup serius. Kita tidak bisa meningkatkan atau memperbaiki keadaan masyarakat disuatu tempat jika kita tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup bagus. Untuk itu kita membutuhkan kerja sama dari semua pihak baik dari pemerintahan maupun dari warga setempat yang juga ikut dilibatkan. Agar apa yang kita harapkan dapat berjalan dengan lancar”.

V. KESIMPULAN

Dari pemaparan dan pembahasan mengenai hal-hal yang menjadipermasalahan yang telah ditulis sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan dengan pandangan sebagai berikut:

1. Upaya dan peran pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Desa Pancuran Bangko diantaranya adalah melalui program Raskin, BLT(Bantuan Lansung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan).
2. Program yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa sudah sesuai dengan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Sedangkan pendistribusian Raskin di Desa Pancuran Bangko adalah tidak sesuai dengan konsep. Dengan Prinsip Keadilan dalam distribusi, pendistribusian Raskin/Rastra tersebut tidak mencerminkan hak yang semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan.
3. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengentas Desa Pancuran Bangko yaitu : Sumber Daya Manusia Aparat Pemerintahan Desa Pancuran Bangko. Keberadaan aparaat pemerintah Desa tidak bisa dilepaskan dari tugas pokok yang diemban oleh pemerintah, yaitu melayani masyarakat.
 - . Sarana dan Prasarana Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sangat menghambat kinerja pemerintah demi terselenggaranya pemerintahan. Sarana perhubungan yang kurang memadai ini masih menjadi PR tersendiri bagi aparat pemerintah Desa Pancuran Bangko. Seperti jalanan yang rusak, susahya akses menuju lokasi yang ingin dituju, dan masih ada pemukiman atau rumah

warga yang belum menikmati air bersih dan belum tersedianya WC didalam rumahnya sendiri.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung : Alfabeta.
- Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nareswari, 2014. Proyeksi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (Periode Tahun 2006-2017). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP
- Ridwan, Muhtadi, Geliat Ekonomi Islam, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Rivai. 2003. Kepemimpjnan dan Perilaku Organisasi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Salam, Syamsir dan Amir Fadhilah, Sosiologi Pembangunan: Pengantar Studi Pembangunan Lintas Sektoral, Jakarta; lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
- Sartika, C., Balaka M.Y.i, dan Rumbia W.A. 2016. Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna.
- Soekanto. Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Soegijoko, Budi Tjahjati 1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia .Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko.
- Sugiyono, 2012. Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2005. Pembinaan Organisasi Diagnosa dan Intervensi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wrihatnolo Randy 2011, Karakteristik Kemiskinan di Tinjau ditinjau dari variable Pendidikan.